

***PENDAMPINGAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)  
MELALUI KEGIATAN SURVEI PARTISIPATIF SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KECAMATAN NUSALAUT,  
KABUPATEN MALUKU TENGAH***

**<sup>1)</sup>Roy Alan Wattimena, <sup>2)</sup>Sammy Saptenno, <sup>3)</sup>Evandro A.W Manuputy**

<sup>1,2,3)</sup>Politeknik Negeri Ambon

<sup>1)</sup>Email penulis utama:78roy.wattimena@gmail.com

**ABSTRAK**

*Kecamatan Nusalaut merupakan wilayah kepulauan dengan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang besar, namun belum dikelola secara terstruktur dan terkoordinasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tujuh negeri di Kecamatan Nusalaut memiliki potensi wisata yang beragam dan sebagian besar masyarakat menunjukkan minat serta kesiapan untuk membentuk Pokdarwis, meskipun masih diperlukan pendampingan terkait aspek kelembagaan, manajemen, dan promosi wisata. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi model kelembagaan Pokdarwis yang sesuai dengan karakteristik lokal sebagai dasar pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Kecamatan Nusalaut.*

**Kata kunci:** Pokdarwis; desa wisata; pariwisata berbasis masyarakat; Nusalaut

**I. PENDAHULUAN**

**Analisis Situasi dan Permasalahan Mitra**

Kecamatan Nusalaut merupakan salah satu kecamatan kepulauan di Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari tujuh negeri adat, yaitu Leinitu, Sila, Ameth, Akoon, Abubu, Titawaai, dan Nalahia. Wilayah ini memiliki karakteristik pulau kecil dengan potensi wisata alam bahari, budaya, dan sejarah yang cukup menonjol, seperti pantai berpasir putih, terumbu karang, gereja tua, benteng peninggalan kolonial, serta tradisi adat yang masih lestari. Namun demikian, pemanfaatan potensi wisata tersebut belum optimal dan masih bersifat sporadis serta belum terkelola dalam suatu sistem kelembagaan yang terstruktur.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya wisata. Salah satu instrumen penting dalam pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat adalah keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Pokdarwis berfungsi sebagai motor penggerak kesadaran, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata di tingkat desa.

Berdasarkan hasil observasi awal, Kecamatan Nusalaut belum memiliki kelembagaan Pokdarwis yang terbentuk secara merata dan aktif di setiap negeri. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi Pokdarwis masih terbatas, serta belum tersedianya data dasar mengenai kesiapan kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada survei kelembagaan Pokdarwis sebagai langkah awal untuk mendukung pengembangan desa wisata di Kecamatan Nusalaut.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi wisata di setiap negeri, mengukur tingkat kesiapan masyarakat dalam pembentukan Pokdarwis, serta menyusun rekomendasi model kelembagaan Pokdarwis yang sesuai dengan kondisi lokal. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata serta memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah negeri, dan perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kapasitas pengelolaan wisata berbasis komunitas, sekaligus menjadi wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendampingan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

## II. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk menjawab permasalahan utama mitra, yaitu belum terbentuknya kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) secara sistematis di Kecamatan Nusalaut. Kegiatan dilaksanakan pada tujuh negeri di Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, yang memiliki potensi wisata namun belum dikelola secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi koordinasi awal dengan Pemerintah Kecamatan Nusalaut dan pemerintah negeri, penyusunan instrumen survei kelembagaan, serta penentuan responden kunci yang terdiri atas perangkat negeri, tokoh adat, tokoh pemuda, dan perwakilan

masyarakat. Instrumen survei disusun untuk menggali data terkait potensi wisata, kondisi kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta persepsi terhadap pembentukan Pokdarwis.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pada tahap ini dilakukan survei langsung ke setiap negeri melalui observasi kondisi fisik lokasi wisata, wawancara terstruktur, serta diskusi informal dengan masyarakat setempat. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting daya tarik wisata, sarana dan prasarana pendukung, serta aksesibilitas. Wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah negeri, serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata. Tahap ketiga adalah tahap pendampingan dan pelatihan. Tahap terakhir adalah penyusunan rekomendasi model kelembagaan Pokdarwis yang disesuaikan dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan kegiatan bersifat partisipatif, dengan menempatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) dan keberlanjutan program pengembangan desa wisata di Kecamatan Nusalaut.

### **III. HASIL KEGIATAN**

#### **Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dengan kunjungan lapangan ke tujuh negeri di Kecamatan Nusalaut. Kegiatan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi potensi wisata dan kesiapan kelembagaan Pokdarwis di masing-masing negeri.

Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap negeri memiliki daya tarik wisata yang berbeda-beda, baik berupa wisata alam bahari, wisata budaya, maupun wisata sejarah. Namun demikian, sebagian besar potensi tersebut belum dikelola secara profesional dan masih bersifat individual atau insidental.

**Potensi Wisata di Kecamatan Nusalaut**

Berdasarkan hasil survei, potensi wisata di Kecamatan Nusalaut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Wisata alam didominasi oleh pantai berpasir putih, perairan laut yang jernih, serta potensi terumbu karang. Wisata budaya tercermin dari tradisi adat, ritual keagamaan, dan kearifan lokal masyarakat, sedangkan wisata sejarah meliputi bangunan tua dan situs peninggalan kolonial. Berdasarkan kompilasi sumber resmi & pemerintah lokal:

- 1) Warisan budaya/sejarah: Gereja Tua Eben Haezer (1715), Gereja Tua Betheden (1906), Benteng Beverwijk, patung Martha Christina Tiahahu, dan tradisi ritual negeri. Ini memberi keunikan narasi heritage yang jarang dimiliki pulau kecil lain di Maluku.
- 2) Ekowisata bahari & bentang alam: pantai berpasir bersih, spot snorkeling, danau kecil (contoh Danau Riul – Abubu sering dipromosikan komunitas), serta sumber air panas. Potensi ini cocok untuk wisata alam berdaya dukung kecil dengan pendekatan konservasi.

**Kondisi Kelembagaan Dan Ekosistem Pariwisata Lokal**

- 1) Pokdarwis/desa wisata. Aktivitas pendampingan Pokdarwis di wilayah Lease (pulau tetangga) tampak aktif dalam beberapa tahun terakhir; namun Nusalaut membutuhkan pembentukan/penguatan formal Pokdarwis per-desa agar akses ke program provinsi/kabupaten lebih lancar (pelatihan ekonomi kreatif, hospitality, bahasa, pemanduan, konservasi).
- 2) UMKM & perdagangan. Di kabupaten, jumlah sarana perdagangan 978 unit dan kategori perdagangan menyumbang 13,71% PDRB. Ini memberi basis hulu-hilir bagi rantai pasok kuliner/kerajinan di desa wisata bila kanal distribusi antarpulau lancar.
- 3) Mitigasi bencana & keselamatan wisata. mengambarkan status fasilitas mitigasi (rambu/evakuasi, peralatan keselamatan) per-desa; sebagian desa belum memiliki sistem peringatan dini. Untuk pulau kecil, aspek keselamatan pelayaran lokal, jalur evakuasi, dan SOP wisata air menjadi prasyarat sebelum mendorong kunjungan massal.

**Kesiapan Kelembagaan Pokdarwis**

Dari sisi kelembagaan, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar negeri telah memiliki struktur sosial dan organisasi masyarakat yang dapat menjadi embrio pembentukan Pokdarwis. Dukungan pemerintah negeri dan tokoh adat terhadap pembentukan Pokdarwis relatif tinggi. Namun, pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan mekanisme kerja Pokdarwis masih terbatas.

Kelemahan utama yang ditemukan meliputi belum adanya struktur organisasi Pokdarwis yang jelas, belum tersusunnya program kerja, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata dan promosi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan Pokdarwis perlu disertai dengan pendampingan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kelembagaan dan manajemen.



### **Keberlanjutan Program Pengabdian**

Keberlanjutan program pengabdian menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa hasil kegiatan tidak berhenti pada tahap survei dan pemetaan awal. Hasil kegiatan ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dan pemerintah negeri dalam menyusun program lanjutan berupa pembentukan dan penguatan Pokdarwis, pelatihan manajemen destinasi wisata, serta pengembangan jejaring promosi wisata. Perguruan tinggi diharapkan dapat terus berperan melalui kegiatan pendampingan berkelanjutan, penelitian terapan, serta pengabdian lanjutan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal.



**IV. PENUTUP****4.1. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian berupa survei kelembagaan Pokdarwis di Kecamatan Nusalaut berhasil memetakan potensi wisata dan tingkat kesiapan masyarakat dalam pembentukan Pokdarwis di tujuh negeri. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa potensi wisata di Kecamatan Nusalaut cukup besar dan didukung oleh minat masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas dan pendampingan kelembagaan.

**4.2. Saran**

Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu memfasilitasi pembentukan dan pengesahan Pokdarwis di negeri-negeri yang telah siap. Selain itu, diperlukan program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan terkait manajemen wisata, promosi, dan pengelolaan keuangan. Kolaborasi antar-negeri juga perlu didorong untuk memperkuat promosi dan pengembangan kawasan wisata Kecamatan Nusalaut secara terpadu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Conley, D 2002, *The daily miracle: an introduction to journalism*, Oxford University Press, New York.

Hall, M 1999, 'Breaking the silence: marginalisation of registered nurses employed in nursing homes', *Contemporary Nurse*, vol. 8, no. 1, hh. 232–237.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*, Kemenparekraf RI, Jakarta.

Rustiadi, E, Saefulhakim, S & Panuju, DR 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crestpent Press, Jakarta.

Sunaryo, B 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.

Todaro, MP & Smith, SC 2015, *Economic Development*, Pearson Education, New York.